



Pegadaian

KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA

Pernyataan

Dokumen ini merupakan rangkuman “Kebijakan Hak Asasi Manusia” PT Pegadaian. Kebijakan ini disusun untuk mempertegas komitmen perusahaan dalam menghormati, melindungi, dan mempromosikan hak asasi manusia di seluruh aktivitas bisnis, sejalan dengan standar nasional dan internasional.

Latar Belakang & Komitmen

Sebagai BUMN yang memiliki peran sosial dan ekonomi, Pegadaian meyakini bahwa keberlanjutan usaha hanya dapat dicapai dengan menjunjung tinggi prinsip HAM. Oleh karena itu, kebijakan ini menjadi panduan bagi seluruh insan Pegadaian dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, aman, sehat, bebas dari diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan, serta memastikan perlakuan yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan.

Referensi

- UUD 1945.
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- The 10 UN Global Compact Principles.
- Konvensi ILO No. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 169, 182, 190.

Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku di seluruh rantai nilai Pegadaian, termasuk karyawan, mitra bisnis, pemasok, pelanggan, dan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Komitmen & Prinsip Utama

Pegadaian menetapkan sejumlah komitmen pokok dalam implementasi kebijakan HAM, di antaranya:

- Menyediakan lingkungan kerja yang bebas diskriminasi, pelecehan, dan perbudakan modern.
- Melarang pekerja anak, dengan batas usia minimum 18 tahun.
- Menjamin kebebasan berserikat dan hak berunding kolektif bagi seluruh pekerja.
- Menyediakan kesempatan kerja yang adil, setara, dan nondiskriminatif, termasuk dalam hal upah dan jam kerja.



Pegadaian

- Menyediakan mekanisme pengaduan (grievance mechanism) dan Whistleblowing System untuk menangani pelanggaran HAM.
- Melakukan uji tuntas (due diligence) HAM dan penilaian berbasis risiko secara berkelanjutan.
- Menghormati hak-hak masyarakat adat, khususnya yang terdampak kegiatan operasional.

Mekanisme Implementasi & Pengawasan

Pelaksanaan kebijakan HAM dikomunikasikan dan didokumentasikan secara luas kepada seluruh karyawan, mitra, dan pemangku kepentingan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitas penerapan. Jika terjadi pelanggaran HAM, Pegadaian akan mengambil langkah korektif, baik berupa perbaikan sistem maupun tindakan disiplin terhadap pelanggar.

Penutup

Melalui kebijakan ini, Pegadaian menegaskan komitmennya untuk menciptakan budaya kerja yang menghormati martabat manusia, mencegah pelanggaran HAM, serta memberikan perlakuan adil bagi seluruh insan perusahaan dan pemangku kepentingan. Kebijakan ini juga memperkuat reputasi Pegadaian sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan berintegritas.